



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

**KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN
HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam kebijakan hilirisasi mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga pengusahaannya harus memperhatikan daya saing, efisiensi dan kelanjutan berusaha;

b. bahwa dalam rangka mendukung upaya tertib usaha di bidang pertambangan, hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta menciptakan kepastian usaha dan kepastian hukum sehubungan dengan kebijakan hilirisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengaturan terhadap ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Eksport Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);*
2. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
18. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
2. Produk pertambangan hasil pengolahan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang telah diolah berupa mineral logam yang telah mencapai batasan minimum pengolahan yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
3. Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang telah diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah mencapai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.
4. Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, yang selanjutnya disebut ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian adalah perusahaan yang telah mendapat pengakuan untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian.
5. Persetujuan Ekspor adalah izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan.
6. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
7. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

8. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
9. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
10. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan tahapan kegiatan industri untuk pengolahan dan/atau pemurnian.
11. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang ekspor yang dilakukan Surveyor.
12. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan pemeriksaan teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
13. Indonesia *National Single Window*, yang selanjutnya disebut INSW, adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision-making for custom release and clearance of cargoes*).
14. Portal INSW adalah sistem yang akan melakukan integrasi informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis, yang meliputi sistem kepabeanan, perizinan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan sistem lain yang terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang.
15. Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan INSW ekspor secara penuh.
16. Wilayah Kosong adalah wilayah yang memiliki potensi menjadi sumber Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian tetapi belum menjadi wilayah kerja Surveyor.
17. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang berwenang dan merupakan pertimbangan teknis untuk diterbitkan Persetujuan Ekspor.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
19. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

20. Menteri Perindustrian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
22. Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
23. Dirjen BIM adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Produk Pertambangan yang berasal dari mineral logam yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian, mineral bukan logam, dan batuan yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan merupakan Produk Pertambangan yang dibatasi ekspornya.
- (2) Produk Pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Produk Pertambangan yang berasal dari mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dalam bentuk *ore* dan belum mencapai batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian dilarang diekspor.
- (4) Produk Pertambangan yang dilarang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Produk Pertambangan yang berasal dari mineral logam sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang sudah mencapai batasan minimum pengolahan hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan ekspor Produk Pertambangan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dari Menteri.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian kepada Direktur Jenderal.

- (3) Untuk mendapat pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
- a. fotokopi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian atau IUI;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d. Rekomendasi dari kementerian teknis terkait:
 - 1) Pemilik IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi dan pemilik IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian, diperoleh dari Menteri ESDM;
 - 2) Pemilik IUI diperoleh dari Menteri Perindustrian.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat jenis Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
- (5) Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

- (1) Pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bentuk pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Ekspor produk pertambangan:
 - a. untuk produk pertambangan yang tercantum dalam Lampiran I dapat dilaksanakan tanpa Persetujuan Ekspor dari Menteri tetapi harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
 - b. untuk produk pertambangan yang tercantum dalam Lampiran II hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dan harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (2) Menteri mendeklarasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Direktur Jenderal.

- (3) Untuk mendapat Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - d. Rekomendasi dari Menteri ESDM.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, paling sedikit memuat jenis, jumlah, dan pelabuhan muat produk pertambangan hasil pengolahan.
- (5) Persetujuan Ekspor berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (6) Untuk mendapatkan perpanjangan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. fotokopi ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 - b. fotokopi Persetujuan Ekspor sebelumnya; dan
 - c. fotokopi Kartu Kendali.
- (7) Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (8) Bentuk Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 2 oleh Menteri Perindustrian, Pasal 4 ayat (3) huruf d angka 1 dan Pasal 6 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Menteri ESDM, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang akan dieksport wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:
- memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - berpengalaman sebagai Surveyor atas produk pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang/perwakilan di wilayah Indonesia;
 - memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, drafter, analis laboratorium dan geologis;
 - memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium sendiri yang terakreditasi dengan peralatan lengkap dan dapat bekerja sama dengan laboratorium lain yang sesuai dengan lingkup produk pertambangan;
 - laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf e harus berada di wilayah kerjanya yang berbeda; dan
 - mempunyai rekam jejak (*track record*) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang ekspor.
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - keterangan wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/perwakilan dan lokasi laboratorium;
 - keterangan jenis produk pertambangan di wilayah kerja;
 - keterangan jenis produk pertambangan yang sudah pernah diverifikasi;
 - daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan lokasi kerjanya dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa dan Lampiran VIb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - bukti kerja sama pemanfaatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, jika ada kerja sama pemanfaatan laboratorium;

- j. daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup produk pertambangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- k. daftar nama pejabat penandatangan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
 - b. jumlah produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
 - c. jenis dan spesifikasi produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif di laboratorium; dan
 - d. waktu pengapalan dan pelabuhan muat.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 - b. Negara dan pelabuhan tujuan ekspor;
 - c. nilai ekspor;
 - d. dokumen yang memuat kesesuaian antara produk pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, dan/atau IUI;
 - e. kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, dan/atau IUI dengan wilayah asal produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - f. bukti pelunasan pembayaran royalti.

- (4) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisa kuantitatif yang terkandung dalam produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian.
- (5) ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan LS digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- (6) Penerbitan LS oleh Surveyor paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan muat barang dilakukan.
- (7) LS yang diterbitkan oleh Surveyor hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali pengapalan untuk pendaftaran 1 (satu) nomor PEB.
- (8) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
- (9) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor produk pertambangan yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 11

- (1) Surveyor yang akan melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) di daerah yang belum ditetapkan sebagai wilayah kerjanya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penambahan wilayah kerja dimaksud kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan penambahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Terhadap produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang berasal dari Wilayah Kosong, ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dapat mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.
- (2) Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang berasal dari Wilayah Kosong oleh Surveyor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan khusus dari Direktur Jenderal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

- (3) Untuk mendapatkan persetujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, atau IUI; dan
 - b. fotokopi kontrak jual beli untuk 1 (satu) kali transaksi milik ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
- (4) Surveyor hanya dapat menerbitkan LS hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang berasal dari Wilayah Kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 13

Verifikasi atau Penelusuran Teknis ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang dilakukan oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 14

- (1) ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan ekspor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Eksport Produk Industri dan Pertambangan dengan tembusan kepada Dirjen Minerba dan/atau Dirjen BIM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>

Pasal 15

- (1) Surveyor wajib menyampaikan LS melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> yang akan diteruskan ke Portal INSW.
- (2) Bagi Surveyor yang menerbitkan LS di Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah LS diterbitkan.
- (3) Bagi Surveyor yang menerbitkan LS pada selain Pelabuhan Mandatori wajib menyampaikan LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterbitkan.

- (4) Surveyor wajib memastikan bahwa produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang dieksport sesuai dengan yang tercantum dalam LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Pasal 16

- (1) Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilaksanakannya setiap bulan.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Dirjen Minerba dalam hal ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Dirjen BIM dalam hal ini Direktur Industri Material Dasar Logam dan Direktur Kimia Dasar pada minggu pertama bulan berikutnya.
- (3) Surveyor wajib menyampaikan rekapitulasi atas LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) setiap bulannya kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Pengakuan ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dicabut apabila:
- setelah diperiksa kembali, dokumen yang disampaikan untuk mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian terbukti tidak benar;
 - tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebanyak 3 (tiga) kali;
 - mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 - mengeksport produk pertambangan yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian; dan/atau
 - dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

- (2) Pencabutan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (3) ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian setelah 1 (satu) tahun dan harus mendapat rekomendasi pengaktifan kembali dari Menteri ESDM atau Menteri Perindustrian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 18

Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian, dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :

- a. ketentuan mengenai Verifikasi atau Penelusuran Teknis produk pertambangan yang tercantum di dalam:
 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Produk Pertambangan Tertentu; dan
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- b. Ketentuan mengenai ekspor sisa dan skrap logam dan ekspor perak dan emas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- d. Kontrak Karya yang ditandatangani sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai persyaratan untuk memperoleh pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dan Persetujuan Ekspor, sampai jangka waktunya berakhir.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

**PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
YANG DIBATASI EKSPORNYA****A. MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM**

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Kuarsa dalam bentuk cullet dengan kadar SiO ₂ ≥ 80%	ex 2506.10.00.00
2.	Kuarsa dalam bentuk gravel pack dengan kadar SiO ₂ ≥ 98,5%, roundness ≥ 60%, sphericity ≥ 70%, kelarutan dalam asam ≤ 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5000 psi, fraksi ukuran -40+70 mesh ≤ 6,2%	ex 2506.10.00.00
3.	Kaolin olahan dengan Brightness ≥ 79%; Ukuran butir lolos saringan 325 mesh ≥ 99%; SiO ₂ ≤ 46%; dan Al ₂ O ₃ ≥ 36%.	ex 2507.00.00.00 ex 3802.90.20.00
4.	Kapur tohor dengan CaO ≥ 96%; Ca(OH) ₂ antara 70-74%; Ukuran butir≤1000 mesh; CaCO ₃ ≥ 98%; dan Berat jenis ≤ 0,7 g/cc.	ex 2522.10.00.00
5.	Feldspar olahan dengan kandungan (K ₂ O + Na ₂ O) ≥ 10%; dan Fe ₂ O ₃ ≤1%.	ex 2529.10.00.00
6.	Zirkonium Silikat (ZrSiO ₄), (ZrO ₂ ≥ 63 %) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
7.	Zirkonium Silikat (ZrSiO ₄), (ZrO ₂ ≥ 62%) d ₅₀ =1,1 ± 0,2 µm dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
8.	Zeolit dalam bentuk bubuk dengan KTK ≥ 80 meq/100 gram	ex 2530.90.90.00 ex 3802.90.90.00 ex 3824.90.99.00
9.	(ZrO ₂ + HfO ₂) ≥ 99% dalam bentuk bubuk/bentuk pasiran (natural ZrO ₂)	ex 2615.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
10.	Pasir Zirkon (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 \geq 65,5\%$) lolos saringan 60 mesh $\geq 95\%$ dalam bentuk bubuk/bentuk pasiran	ex 2615.10.00.00
11.	Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 \geq 64\%$) lolos saringan 325 mesh $\geq 95\%$ dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
12.	Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 \geq 63\%$) $d_{50} = 1,43 \pm 0,16 \mu\text{m}$ dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
13.	Zirkonium Silikat (ZrSiO_4), ($\text{ZrO}_2 \geq 62\%$) $d_{50} = 1,1 \pm 0,2 \mu\text{m}$ dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
14.	Zeolit dalam bentuk bubuk dengan KTK $\geq 80 \text{ meq}/100 \text{ gram}$	ex 2530.90.90.00 ex 3802.90.90.00 ex 3824.90.99.00
15.	Ilmenite FeTiO_3 bentuk bubuk dan pasiran dengan kadar $\geq 98\%$ FeTiO_3	ex 2614.00.10.00
16.	Tellurium dengan kadar $\geq 99\%$ Te	ex 2804.50.00.00
17.	Selenium dengan kadar $\geq 99\%$ Se	ex 2804.90.00.00
18.	Logam jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang $\geq 99\%$, yaitu:	
a.	Skandium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
b.	Itrium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
c.	Lantanum kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
d.	Serium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
e.	Praseodium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
f.	Neodimium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
g.	Prometium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
h.	Samarium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00
i.	Europium kadar $\geq 99\%$	ex 2805.30.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	j. Gadolinium kadar ≥ 99%	ex 2805.30.00.00
	k. Terbium kadar ≥ 99%	ex 2805.30.00.00
	l. Disprosium kadar ≥ 99%	ex 2805.30.00.00
	m. Holmium kadar ≥ 99%	ex 2805.30.00.00
	n. Erbium kadar ≥ 99%	ex 2805.30.00.00
	o. Tulium kadar ≥ 99%	ex 2805.30.00.00
	p. Iterbium kadar ≥ 99%	ex 2805.30.00.00
	q. Lutesium kadar ≥ 99%	ex 2805.30.00.00
19.	Tellurium dioksida dengan kadar ≥ 98% Te	ex 2811.29.90.00
20.	Zirkonium Oksiklorida (ZOC) $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ kadar ≥ 90%	ex 2812.10.00.00
21.	Seng Oksida (ZnO) ≥ 98%	ex 2817.00.10.00
22.	Seng Peroksida (ZnO_2) ≥ 98%	ex 2817.00.20.00
23.	Smelter grade alumina ≥ 98% Al_2O_3	ex 2818.20.00.00
24.	Chemical Grade Alumina ≥ 90% Al_2O_3	ex 2818.20.00.00
25.	Chemical Grade Aluminium hidroksida ≥ 90% $\text{Al}(\text{OH})_3$	ex 2818.30.00.00
26.	Mangan dioksida MnO_2 dengan kandungan Mn ≥ 15%	ex 2820.10.00.00
27.	Mangan Dioksida Sintetik ($\text{MnO}_2 \geq 98\%$)	ex 2820.10.00.00
28.	Mangan Monoksida dengan kadar Mn ≥ 47,5% dan $\text{MnO}_2 \leq 4\%$ sebagai impuritis	ex 2820.90.00.00
29.	Mangani Oksida ($\text{Mn}_3\text{O}_4 \geq 90\%$)	ex 2820.90.00.00
30.	Titanium oksida bentuk bubuk dan pasiran ≥ 90% TiO_2	ex 2823.00.00.00
31.	Timbal oksida dengan kadar ≥ 98% PbO	ex 2824.10.00.00
32.	Timbal dioksida dengan kadar ≥ 98% PbO_2	ex 2824.90.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
33.	Vanadium pentaoksida $\geq 90\%$ V ₂ O ₅	ex 2825.30.00.00
34.	Nikel hidroksida -Mix Hydroxide Presipitate (MHP) $\geq 25\%$ Ni	ex 2825.40.00.00
35.	(ZrO ₂ + HfO ₂) $\geq 99\%$ dalam bentuk bubuk/bentuk pasiran (artificial ZrO ₂)	ex 2825.60.00.00
36.	Antimon Oksida dengan kadar Sb ₂ O ₅ $\geq 90\%$	ex 2825.80.00.00
37.	Nb ₂ O ₅ $\geq 90\%$ (Neobium Oksida) dalam bentuk bubuk	ex 2825.90.00.00
38.	Nb ₂ O ₅ $\geq 90\%$ (Neobium Oksida) dalam bentuk granula	ex 2825.90.00.00
39.	Seng Hidroksida Zn(OH) ₂ $\geq 98\%$	ex 2825.90.00.00
40.	Ta ₂ O ₅ $\geq 90\%$ (Thalium Oksida) dalam bentuk bubuk	ex 2825.90.00.00
41.	Ta ₂ O ₅ $\geq 90\%$ (Thalium Oksida) dalam bentuk granula	ex 2825.90.00.00
42.	Tellurium hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ Te(OH) ₄	ex 2825.90.00.00
43.	Timbal hidroksida dengan kadar $\geq 98\%$ Pb(OH) ₂	ex 2825.90.00.00
44.	Mangan Klorida (MnCl ₂ $\geq 90\%$)	ex 2827.39.90.00
45.	NiS $\geq 40\%$ Ni dalam bentuk bubuk	ex 2830.90.90.00 ex 7501.10.00.00
46.	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar Ni $\geq 70\%$	ex 2825.40.00.00
47.	Kobal sulfida CoS $\geq 40\%$ Co	ex 2830.90.90.00
48.	Nikel sulfida -Mix Sulfide Presipitate (MSP) $\geq 45\%$ Ni	ex 2830.90.90.00
49.	Mangan Sulfat (MnSO ₄ $\geq 90\%$)	ex 2833.29.90.00
50.	Zirkonium Sulfat (ZOS) Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O dengan kadar $\geq 90\%$	ex 2833.29.90.00
51.	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O kadar $\geq 90\%$	ex 2833.29.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
52.	Zirkonium Sulfat (ZOS) Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O kadar ≥ 90%	ex 2833.29.90.00
53.	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) ≥ 40% Ni	ex 2836.99.00.00
54.	Mangan Karbonat Sintetik (MnCO ₃) ≥90%;	ex 2836.99.90.00
55.	Mangan Karbonat (MnCO ₃ ≥ 90%)	ex 2836.99.90.00
56.	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) ZrOCO ₃ .xH ₂ O kadar ≥ 90%	ex 2836.99.90.00
57.	Kalium Permanganat (KMnO ₄ ≥ 90%)	ex 2841.61.00.00
58.	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O kadar ≥ 90%	ex 2842.90.90.00
59.	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) K ₂ ZrF ₆ kadar ≥ 90%	ex 2842.90.90.00
60.	Logam hidroksida tanah jarang (REOH) (≥ 99%)	ex 2846.90.00.00
61.	Logam oksida tanah jarang (REO) (≥ 99%)	ex 2846.90.00.00
62.	Zirkonium Asetat (ZAC) H ₂ ZrO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂ kadar ≥ 90%	ex 2915.29.90.00
63.	Titanium oksida dalam bentuk bubuk dan pasiran dengan kadar ≥ 90% TiO ₂	ex 3206.49.90.00
64.	Bentonit dengan bleaching power ≥ 70%	ex 3802.90.20.00
65.	Perak dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Ag	ex 7106.10.00.00
66.	Perak dalam bentuk bongkahan (lumps), ingot atau batang tuangan dengan kadar ≥ 99% Ag	ex 7106.91.00.00
67.	Emas dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Au	ex 7108.11.00.00
68.	Emas dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar ≥ 99% Au	ex 7108.12.00.10
69.	Emas dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar ≥ 99% Au	ex 7108.12.00.10
70.	Platinum dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar ≥ 99% Pt	ex 7110.11.00.10
71.	Platinum dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 99% Pt	ex 7110.11.00.10

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
72.	Platinum dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar $\geq 99\%$ Pt	ex 7110.11.00.10
73.	Paladium dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar $\geq 99\%$ Pd	ex 7110.21.00.20
74.	Paladium dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 99\%$ Pd	ex 7110.21.00.20
75.	Paladium dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar $\geq 99\%$ Pd	ex 7110.21.00.20
76.	Besi wantah dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar $\geq 90\%$	ex 7201.10.00.00
77.	NPI paduan (besi pig paduan) dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan $\geq 4\%$ Ni	ex 7201.50.00.00
78.	NPI paduan (besi pig paduan) dalam bentuk ingot dengan $\geq 4\%$ Ni	ex 7201.50.00.00
79.	Fero Mangan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Mn $\geq 60\%$	ex 7202.11.00.00 ex 7202.19.00.00
80.	Logam paduan (alloy) fero silikon $\geq 88\%$ Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.29.00.00
81.	Silika Mangan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Mn $\geq 60\%$	ex 7202.30.00.00
82.	Logam paduan (alloy) fero krom $\geq 60\%$ Cr dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.41.00.00
83.	Logam paduan (alloy) fero krom $\geq 60\%$ Cr dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.41.00.00
84.	Logam paduan (alloy) fero krom $\geq 88\%$ Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.41.00.00
85.	Logam paduan (alloy) fero krom $\geq 60\%$ Cr dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.49.00.00
86.	Logam paduan (alloy) fero krom $\geq 60\%$ Cr dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.49.00.00
87.	Logam paduan (alloy) fero krom $\geq 88\%$ Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.49.00.00
88.	FeNi spon (Sponge FeNi) $\geq 4\%$ Ni	ex 7202.60.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
89.	Logam paduan (alloy) fero nikel ≥ 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.60.00.00
90.	Nikel dalam bentuk lumps, nugget, luppen dengan kandungan FeNi ≥ 4% Ni	ex 7202.60.00.00
91.	Nickel Pig Iron (NPI) dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan ≥ 4% Ni	ex 7202.60.00.00
92.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan Ni ≥ 10%	ex 7202.60.00.00
93.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk ingot dengan Ni ≥ 10%	ex 7202.60.00.00
94.	Logam paduan (alloy) fero krom ≥ 60% Cr dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.49.00.00
95.	Logam paduan (alloy) fero krom ≥ 60% Cr dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.49.00.00
96.	Logam paduan (alloy) fero molibdenum ≥ 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.70.00.00
97.	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten ≥ 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.80.00.00
98.	Fero titanium ≥ 65% Ti dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.91.00.00
99.	Fero titanium ≥ 65% Ti dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.91.00.00
100.	Logam paduan (alloy) fero-titanium dan fero-silikon-titanium ≥ 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.91.00.00
101.	Logam paduan (alloy) fero vanadium ≥ 65% V dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.92.00.00
102.	Logam paduan (alloy) fero vanadium ≥ 65% V dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.92.00.00
103.	Logam paduan (alloy) fero-vanadium ≥ 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.92.00.00
104.	Besi spon dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar ≥ 75% Fe	ex 7203.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
105.	Tembaga dalam bentuk katoda dengan kadar $\geq 99\%$ Cu	ex 7403.11.00.00
106.	Tembaga dalam bentuk billet dengan kadar $\geq 99\%$ Cu	ex 7403.13.00.00
107.	Tembaga dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar $\geq 99\%$ Cu	ex 7403.19.00.00
108.	Tembaga dalam bentuk slab dengan kadar $\geq 99\%$ Cu	ex 7403.19.00.00
109.	Tembaga dalam bentuk bubuk (<i>non-lamellar structure</i>) dengan kadar $\geq 99\%$ Cu	ex 7406.10.00.00
110.	Tembaga dalam bentuk bubuk (<i>lamellar structure</i>) dengan kadar $\geq 99\%$ Cu	ex 7406.20.00.00
111.	Ni Mate dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan Ni $\geq 70\%$	ex 7501.10.00.00
112.	Ni Mate dalam bentuk bubuk dengan Ni $\geq 70\%$	ex 7501.10.00.00
113.	Ni Mate dalam bentuk granula dengan Ni $\geq 70\%$	ex 7501.10.00.00
114.	Ni Mate dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan Ni $\geq 70\%$	ex 7501.10.00.00
115.	Ni Mate dalam bentuk slab dengan Ni $\geq 70\%$	ex 7501.10.00.00
116.	FeNi spon (Sponge FeNi) $\geq 4\%$ Ni	ex 7501.20.00.00
117.	Impure FeNi dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan $\geq 10\%$ Ni	ex 7501.20.00.00
118.	Impure FeNi dalam bentuk ingot dengan $\geq 10\%$ Ni	ex 7501.20.00.00
119.	Nikel dalam bentuk lumps, nugget, luppen dengan kandungan FeNi $\geq 4\%$ Ni	ex 7501.20.00.00
120.	NPI dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan $\geq 4\%$ Ni	ex 7501.20.00.00
121.	NPI dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan $\geq 4\%$ Ni	ex 7501.20.00.00
122.	Nikel dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Ni $\geq 93\%$	ex 7502.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
123.	Nikel dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar Ni ≥ 93%	ex 7502.10.00.00
124.	Nickel Pig Iron (NPI) paduan dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan ≥ 4% Ni	ex 7502.20.00.00
125.	Nickel Pig Iron (NPI) paduan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan ≥ 4% Ni	ex 7502.20.00.00
126.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar Ni ≥ 93%	ex 7504.00.00.00
127.	Logam Al ≥ 99% dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7601.10.00.00
128.	Bullion ≥ 90% Timbal (Pb) dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7801.10.00.00
129.	Bullion ≥ 90% Timbal (Pb) dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7801.10.00.00
130.	Timbal (Pb) dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar ≥ 90% Pb	ex 7801.10.00.00
131.	Bullion ≥ 90% Timbal (Pb) dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7801.91.00.00
132.	Bullion ≥ 90% Timbal (Pb) dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7801.91.00.00
133.	Bullion ≥ 90% Timbal (Pb) dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7801.99.00.00
134.	Bullion ≥ 90% Timbal (Pb) dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7801.99.00.00
135.	Timbal dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 90% Pb	ex 7804.20.00.00
136.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar ≥ 90% Zn dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7901.11.00.00
137.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar ≥ 90% Zn dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7901.11.00.00
138.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar ≥ 90% Zn dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7901.12.00.00
139.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar ≥ 90% Zn dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7901.12.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
140.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar ≥ 90% Zn dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7901.20.00.00
141.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar ≥ 90% Zn dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7901.20.00.00
142.	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar ≥ 90%	ex 8101.10.00.00
143.	Wolfram dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar ≥ 90%	ex 8101.94.00.00
144.	Wolfram dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar ≥ 90%	ex 8101.94.00.00
145.	Wolfram dalam bentuk granula dengan kadar ≥ 90%	ex 8101.99.90.00
146.	Logam kobalt (Co) ≥ 93% dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8105.20.10.00
147.	Logam kobalt (Co) ≥ 93% dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8105.20.10.00
148.	Titanium ≥ 65% Ti dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8108.20.00.00
149.	Titanium ≥ 65% Ti dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8108.20.00.00
150.	Spon Zirkonium dalam bentuk bongkahan (lumps) kadar ≥ 85% Zr	ex 8109.20.00.00
151.	Zirkonium dalam bentuk bongkahan (lumps) kadar ≥ 95% Zr	ex 8109.20.00.00
152.	Zirkonium dalam bentuk bubuk kadar ≥ 95% Zr	ex 8109.20.00.00
153.	Zirkonium dalam bentuk granula kadar ≥ 95% Zr	ex 8109.90.00.00
154.	Fero Mangan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Mn ≥ 60%	ex 8111.00.00.00
155.	Mangan spon (Mn ≥ 49% dan MnO ₂ ≤ 4%)	ex 8111.00.00.00
156.	Silika Mangan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Mn ≥ 60%	ex 8111.00.00.00
157.	Logam krom (Cr) ≥ 99% dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8112.21.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
158.	Logam krom (Cr) ≥ 99% dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8112.21.00.00
159.	Logam paduan (alloy) ≥ 60% Cr dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8112.21.00.00
160.	Logam paduan (alloy) ≥ 60% Cr dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8112.21.00.00
161.	Hafnium dalam bentuk bongkahan (lumps) kadar ≥ 95% Hf	ex 8112.92.00.00
162.	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar ≥ 95% Hf	ex 8112.92.00.00
163.	Logam paduan (alloy) ≥ 65% V dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8112.92.00.00
164.	Logam paduan (alloy) ≥ 65% V dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8112.92.00.00
165.	Hafnium dalam bentuk granula kadar ≥ 95% Hf	ex 8112.99.00.00

B. BATUAN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan Pemotongan	ex 2514.00.00.00 6803.00.00.00
2.	Marmer yang telah dilakukan pemotongan dan/atau pemolesan	ex 2515.12.10.00 ex 2515.12.20.00 ex 6802.10.00.00 ex 6802.21.00.00 ex 6802.91.10.00
3.	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.12.10.00 ex 2516.12.20.00 ex 2517.10.00.00 ex 6802.10.00.00 ex 6802.23.00.10 ex 6802.23.00.10
4.	Basalt yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00 ex 2517.49.00.00
5.	Gabro yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00 ex 2517.49.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
6.	Granodiorit yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00 ex 2517.49.00.00
7.	Peridotit yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00 ex 2517.49.00.00
8.	Toseki yang sudah mengalami pengolahan	ex 2530.90.90.00
9.	Perlit yang sudah dilakukan penggerusan dan pemanasan	ex 3802.90.90.00 ex 6806.20.00.00
10.	Intan yang sudah dipoles dan dipotong untuk industri	ex 7102.29.00.00
11.	Intan yang sudah dipoles dan dipotong untuk perhiasan	ex 7102.39.00.00
12.	Onik yang telah dilakukan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 7103.10.90.00
13.	Agat yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00
14.	Chert (rijang) yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00
15.	Garnet yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00
16.	Giok (jade) yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00
17.	Jasper yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00
18.	Kalsedon yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00
19.	Opal yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00
20.	Krisopras yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00
21.	Topas yang sudah dilakukan pemolesan	ex 7103.99.00.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

**PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN
YANG DIBATASI EKSPORNYA**

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
2.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar $\geq 51\%$ Fe dan kadar ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$) $\geq 10\%$	ex 2601.11.00.00 ex 2601.12.00.00
3.	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	ex 2602.00.00.00
4.	Tembaga telurid	ex 2620.30.00.00
5.	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu	ex 2603.00.00.00
6.	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 57\%$ Pb	ex 2607.00.00.00
7.	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 52\%$ Zn	ex 2608.00.00.00
8.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex 2614.00.10.00
9.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe $\geq 58\%$ (bentuk pasir) dan kadar Fe $\geq 56\%$ (bentuk pellet)	ex 2614.00.90.00
10.	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	ex 2620.29.00.00 ex 7112.99.90.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DILARANG EKSPORNYA

A. ORE / RAW MATERIAL

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Pirit besi tidak digongseng	2502.00.00.00
2.	Bijih besi tidak diaglomerasi	ex 2601.11.00.00
3.	Bijih besi diaglomerasi	ex 2601.12.00.00
4.	Pirit besi panggang	ex 2601.20.00.00
5.	Bijih mangan	ex 2602.00.00.00
6.	Bijih tembaga	ex 2603.00.00.00
7.	Bijih nikel dan konsentratnya	2604.00.00.00
8.	Bijih kobalt dan konsentratnya	2605.00.00.00
9.	Bijih aluminium dan konsentratnya	2606.00.00.00
10.	Bijih timbal	ex 2607.00.00.00
11.	Bijih seng	ex 2608.00.00.00
12.	Bijih kromium dan konsentratnya	2610.00.00.00
13.	Bijih ilmenite	ex 2614.00.10.00
14.	Bijih titanium lainnya	ex 2614.00.90.00
15.	Bijih zirconium dan konsentratnya	ex 2615.10.00.00
16.	Bijih perak dan konsentratnya	2616.10.00.00
17.	Bijih emas dan konsentratnya	2616.90.00.00

B. BELUM MEMENUHI BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar < 62 % Fe	ex 2601.11.00.00
2.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar < 51% Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) < 10%	ex 2601.11.00.00
3.	Konsentrat besi (hematit, magnetit, pirit) dengan kadar < 62 % Fe	ex 2601.12.00.00
4.	Konsentrat besi (Gutit/laterit) dengan kadar < 51% Fe dan kadar (Al ₂ O ₃ +SiO ₂) < 10%	ex 2601.12.00.00
5.	Konsentrat mangan dengan kadar < 49% Mn	ex 2602.00.00.00
6.	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu	ex 2603.00.00.00
7.	Konsentrat timbal dengan kadar < 57% Pb	ex 2607.00.00.00
8.	Konsentrat seng dengan kadar < 52% Zn	ex 2608.00.00.00

NO.	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
9.	Konsentrat ilmenite dengan kadar Fe < 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe < 56% (bentuk pellet)	ex 2614.00.10.00
10.	Konsentrat titanium lainnya dengan kadar Fe < 58% (bentuk pasir) dan kadar Fe < 56% (bentuk pellet)	ex 2614.00.90.00

C. BELUM MEMENUHI BATASAN MINIMUM PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

1. MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Kuarsa dalam bentuk cullet dengan kadar SiO ₂ < 80%	ex 2506.10.00.00
2.	Kuarsa dalam bentuk gravel pack dengan kadar SiO ₂ < 98,5%, roundness < 60%, sphericity < 70%, kelarutan dalam asam > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5000 psi, fraksi ukuran -40+70 mesh > 6,2%	ex 2506.10.00.00
3.	Kaolin olahan dengan Brightness < 79%; Ukuran butir lolos saringan 325 mesh < 99%; SiO ₂ > 46%; dan Al ₂ O ₃ < 36%.	ex 2507.00.00.00 ex 3802.90.20.00
4.	Kapur tohor dengan CaO < 96%; Ca(OH) ₂ antara 70-74%; Ukuran butir >1000 mesh; CaCO ₃ < 98%; dan Berat jenis > 0,7 g/cc.	ex 2522.10.00.00
5.	Feldspar olahan dengan kandungan (K ₂ O + Na ₂ O) < 10%; dan Fe ₂ O ₃ > 1%.	ex 2529.10.00.00
6.	Zirkonium Silikat (ZrSiO ₄), (ZrO ₂ < 63 %) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
7.	Zirkonium Silikat (ZrSiO ₄), (ZrO ₂ < 62%) d ₅₀ =1,1 ± 0,2 µm dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
8.	Zeolit dalam bentuk bubuk dengan KTK < 80 meq/100 gram	ex 2530.90.90.00 ex 3802.90.90.00 ex 3824.90.99.00
9.	(ZrO ₂ + HfO ₂) < 99% dalam bentuk bubuk/bentuk pasiran (natural ZrO ₂)	ex 2615.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
10.	Pasir Zirkon ($ZrSiO_4$), ($ZrO_2 < 65,5\%$) lolos saringan 60 mesh < 95 % dalam bentuk bubuk/bentuk pasiran	ex 2615.10.00.00
11.	Zirkonium Silikat ($ZrSiO_4$), ($ZrO_2 < 64\%$) lolos saringan 325 mesh < 95% dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
12.	Zirkonium Silikat ($ZrSiO_4$), ($ZrO_2 < 63 \%$) $d_{50} = 1,43 \pm 0,16 \mu\text{m}$ dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
13.	Zirkonium Silikat ($ZrSiO_4$), ($ZrO_2 < 62\%$) $d_{50} = 1,1 \pm 0,2 \mu\text{m}$ dalam bentuk bubuk	ex 2530.90.10.00 ex 2615.10.00.00
14.	Zeolit dalam bentuk bubuk dengan KTK < 80 meq/100 gram	ex 2530.90.90.00 ex 3802.90.90.00 ex 3824.90.99.00
15.	Ilmenite $FeTiO_3$ bentuk bubuk dan pasiran dengan kadar < 98% $FeTiO_3$	ex 2614.00.10.00
16.	Tellurium dengan kadar < 99% Te	ex 2804.50.00.00
17.	Selenium dengan kadar < 99% Se	ex 2804.90.00.00
18.	Logam jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:	
a.	Skandium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
b.	Itrium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
c.	Lantanum kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
d.	Serium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
e.	Praseodium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
f.	Neodimium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
g.	Prometium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
h.	Samarium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
i.	Europium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
	j. Gadolinium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	k. Terbium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	l. Disprosium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	m. Holmium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	n. Erbium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	o. Tulium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	p. Iterbium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
	q. Lutesium kadar < 99%	ex 2805.30.00.00
19.	Tellurium dioksida dengan kadar < 98% Te	ex 2811.29.90.00
20.	Zirkonium Oksiklorida (ZOC) ZrOCl ₂ .8H ₂ O kadar < 90%	ex 2812.10.00.00
21.	Seng Oksida (ZnO) < 98%	ex 2817.00.10.00
22.	Seng Peroksida (ZnO ₂) < 98%	ex 2817.00.20.00
23.	Smelter grade alumina < 98% Al ₂ O ₃	ex 2818.20.00.00
24.	Chemical Grade Alumina < 90% Al ₂ O ₃	ex 2818.20.00.00
25.	Chemical Grade Aluminium hidroksida < 90% Al(OH) ₃	ex 2818.30.00.00
26.	Mangan dioksida MnO ₂ dengan kandungan Mn < 15%	ex 2820.10.00.00
27.	Mangan Dioksida Sintetik (MnO ₂ < 98%)	ex 2820.10.00.00
28.	Mangan Monoksida dengan kadar Mn < 47,5% dan MnO ₂ > 4% sebagai impuritis	ex 2820.90.00.00
29.	Mangani Oksida (Mn ₃ O ₄ < 90%)	ex 2820.90.00.00
30.	Titanium oksida bentuk bubuk dan pasiran < 90% TiO ₂	ex 2823.00.00.00
31.	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO	ex 2824.10.00.00
32.	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂	ex 2824.90.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
33.	Vanadium pentaoksida < 90% V ₂ O ₅	ex 2825.30.00.00
34.	Nikel hidroksida -Mix Hydroxide Presipitate (MHP) < 25% Ni	ex 2825.40.00.00
35.	(ZrO ₂ + HfO ₂) < 99%) dalam bentuk bubuk/bentuk pasiran (artificial ZrO ₂)	ex 2825.60.00.00
36.	Antimon Oksida dengan kadar Sb ₂ O ₅ < 90%	ex 2825.80.00.00
37.	Nb ₂ O ₅ < 90% (Neobium Oksida) dalam bentuk bubuk	ex 2825.90.00.00
38.	Nb ₂ O ₅ < 90% (Neobium Oksida) dalam bentuk granula	ex 2825.90.00.00
39.	Seng Hidroksida Zn(OH) ₂ < 98%	ex 2825.90.00.00
40.	Ta ₂ O ₅ < 90% (Thalium Oksida) dalam bentuk bubuk	ex 2825.90.00.00
41.	Ta ₂ O ₅ < 90% (Thalium Oksida) dalam bentuk granula	ex 2825.90.00.00
42.	Tellurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄	ex 2825.90.00.00
43.	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂	ex 2825.90.00.00
44.	Mangan Klorida (MnCl ₂ < 90%)	ex 2827.39.90.00
45.	NiS < 40% Ni dalam bentuk bubuk	ex 2830.90.90.00 ex 7501.10.00.00
46.	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar Ni < 70%	ex 2825.40.00.00
47.	Kobal sulfida CoS < 40% Co	ex 2830.90.90.00
48.	Nikel sulfida -Mix Sulfide Presipitate (MSP) < 45% Ni	ex 2830.90.90.00
49.	Mangan Sulfat (MnSO ₄ < 90%)	ex 2833.29.90.00
50.	Zirkonium Sulfat (ZOS) Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O dengan kadar < 90%	ex 2833.29.90.00
51.	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O kadar < 90%	ex 2833.29.90.00
52.	Zirkonium Sulfat (ZOS) Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O kadar < 90%	ex 2833.29.90.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
53.	Hydroxide Nickel Carbonate (HNC) < 40% Ni	ex 2836.99.00.00
54.	Mangan Karbonat Sintetik (MnCO_3) < 90%;	ex 2836.99.90.00
55.	Mangan Karbonat (MnCO_3 < 90%)	ex 2836.99.90.00
56.	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ kadar < 90%	ex 2836.99.90.00
57.	Kalium Permanganat (KMnO_4 < 90%)	ex 2841.61.00.00
58.	Amonium Zirkonium Karbonat (AZC) $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ kadar < 90%	ex 2842.90.90.00
59.	Kalium Heksaflоро Zirkonat (KFZ) K_2ZrF_6 kadar < 90%	ex 2842.90.90.00
60.	Logam hidroksida tanah jarang (REOH) (<99%)	ex 2846.90.00.00
61.	Logam oksida tanah jarang (REO) (<99%)	ex 2846.90.00.00
62.	Zirkonium Asetat (ZAC) $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$ kadar < 90%	ex 2915.29.90.00
63.	Titanium oksida dalam bentuk bubuk dan pasiran dengan kadar < 90% TiO_2	ex 3206.49.90.00
64.	Bentonit dengan bleaching power < 70%	ex 3802.90.20.00
65.	Perak dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Ag	ex 7106.10.00.00
66.	Perak dalam bentuk bongkahan (lumps), ingot atau batang tuangan dengan kadar < 99% Ag	ex 7106.91.00.00
67.	Emas dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Au	ex 7108.11.00.00
68.	Emas dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar < 99% Au	ex 7108.12.00.10
69.	Emas dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar < 99% Au	ex 7108.12.00.10
70.	Platinum dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar < 99% Pt	ex 7110.11.00.10
71.	Platinum dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Pt	ex 7110.11.00.10

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
72.	Platinum dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar < 99% Pt	ex 7110.11.00.10
73.	Paladium dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar < 99% Pd	ex 7110.21.00.20
74.	Paladium dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Pd	ex 7110.21.00.20
75.	Paladium dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar < 99% Pd	ex 7110.21.00.20
76.	Besi wantah dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar < 90%	ex 7201.10.00.00
77.	NPI paduan (besi pig paduan) dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan < 4% Ni	ex 7201.50.00.00
78.	NPI paduan (besi pig paduan) dalam bentuk ingot dengan < 4% Ni	ex 7201.50.00.00
79.	Fero Mangan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Mn < 60%	ex 7202.11.00.00 ex 7202.19.00.00
80.	Logam paduan (alloy) fero silikon < 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.29.00.00
81.	Silika Mangan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Mn < 60%	ex 7202.30.00.00
82.	Logam paduan (alloy) fero krom < 60% Cr dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.41.00.00
83.	Logam paduan (alloy) fero krom < 60% Cr dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.41.00.00
84.	Logam paduan (alloy) fero krom < 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.41.00.00
85.	Logam paduan (alloy) fero krom < 60% Cr dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.49.00.00
86.	Logam paduan (alloy) fero krom < 60% Cr dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.49.00.00
87.	Logam paduan (alloy) fero krom < 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.49.00.00
88.	FeNi spon (Sponge FeNi) < 4% Ni	ex 7202.60.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
89.	Logam paduan (alloy) fero nikel < 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.60.00.00
90.	Nikel dalam bentuk lumps, nugget, luppen dengan kandungan FeNi < 4% Ni	ex 7202.60.00.00
91.	Nickel Pig Iron (NPI) dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan < 4% Ni	ex 7202.60.00.00
92.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan Ni < 10%	ex 7202.60.00.00
93.	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk ingot dengan Ni < 10%	ex 7202.60.00.00
94.	Logam paduan (alloy) fero krom < 60% Cr dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.49.00.00
95.	Logam paduan (alloy) fero krom < 60% Cr dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.49.00.00
96.	Logam paduan (alloy) fero molibdenum < 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.70.00.00
97.	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten < 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.80.00.00
98.	Fero titanium < 65% Ti dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.91.00.00
99.	Fero titanium < 65% Ti dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.91.00.00
100.	Logam paduan (alloy) fero-titanium dan fero-silikon-titanium < 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.91.00.00
101.	Logam paduan (alloy) fero vanadium < 65% V dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.92.00.00
102.	Logam paduan (alloy) fero vanadium < 65% V dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7202.92.00.00
103.	Logam paduan (alloy) fero-vanadium < 88% Fe dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7202.92.00.00
104.	Besi spon dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar < 75% Fe	ex 7203.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
105.	Tembaga dalam bentuk katoda dengan kadar < 99% Cu	ex 7403.11.00.00
106.	Tembaga dalam bentuk billet dengan kadar < 99% Cu	ex 7403.13.00.00
107.	Tembaga dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar < 99% Cu	ex 7403.19.00.00
108.	Tembaga dalam bentuk slab dengan kadar < 99% Cu	ex 7403.19.00.00
109.	Tembaga dalam bentuk bubuk (<i>non-lamellar structure</i>) dengan kadar < 99% Cu	ex 7406.10.00.00
110.	Tembaga dalam bentuk bubuk (<i>lamellar structure</i>) dengan kadar < 99% Cu	ex 7406.20.00.00
111.	Ni Mate dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan Ni < 70%	ex 7501.10.00.00
112.	Ni Mate dalam bentuk bubuk dengan Ni < 70%	ex 7501.10.00.00
113.	Ni Mate dalam bentuk granula dengan Ni < 70%	ex 7501.10.00.00
114.	Ni Mate dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan Ni < 70%	ex 7501.10.00.00
115.	Ni Mate dalam bentuk slab dengan Ni < 70%	ex 7501.10.00.00
116.	FeNi spon (Sponge FeNi) < 4% Ni	ex 7501.20.00.00
117.	Impure FeNi dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan < 10% Ni	ex 7501.20.00.00
118.	Impure FeNi dalam bentuk ingot dengan < 10% Ni	ex 7501.20.00.00
119.	Nikel dalam bentuk lumps, nugget, luppen dengan kandungan FeNi < 4% Ni	ex 7501.20.00.00
120.	NPI dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan < 4% Ni	ex 7501.20.00.00
121.	NPI dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan < 4% Ni	ex 7501.20.00.00
122.	Nikel dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Ni < 93%	ex 7502.10.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
123.	Nikel dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar Ni < 93%	ex 7502.10.00.00
124.	Nickel Pig Iron (NPI) paduan dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan < 4% Ni	ex 7502.20.00.00
125.	Nickel Pig Iron (NPI) paduan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan < 4% Ni	ex 7502.20.00.00
126.	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar Ni < 93%	ex 7504.00.00.00
127.	Logam Al < 99% dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7601.10.00.00
128.	Bullion < 90% Timbal (Pb) dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7801.10.00.00
129.	Bullion < 90% Timbal (Pb) dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7801.10.00.00
130.	Timbal (Pb) dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar < 90% Pb	ex 7801.10.00.00
131.	Bullion < 90% Timbal (Pb) dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7801.91.00.00
132.	Bullion < 90% Timbal (Pb) dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7801.91.00.00
133.	Bullion < 90% Timbal (Pb) dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7801.99.00.00
134.	Bullion < 90% Timbal (Pb) dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7801.99.00.00
135.	Timbal dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% Pb	ex 7804.20.00.00
136.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar < 90% Zn dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7901.11.00.00
137.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar < 90% Zn dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7901.11.00.00
138.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar < 90% Zn dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7901.12.00.00
139.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar < 90% Zn dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7901.12.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
140.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar < 90% Zn dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 7901.20.00.00
141.	Seng (Zn) bentuk Bullion kadar < 90% Zn dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 7901.20.00.00
142.	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90%	ex 8101.10.00.00
143.	Wolfram dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar < 90%	ex 8101.94.00.00
144.	Wolfram dalam bentuk ingot atau batang tuangan dengan kadar < 90%	ex 8101.94.00.00
145.	Wolfram dalam bentuk granula dengan kadar < 90%	ex 8101.99.90.00
146.	Logam kobalt (Co) < 93% dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8105.20.10.00
147.	Logam kobalt (Co) < 93% dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8105.20.10.00
148.	Titanium < 65% Ti dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8108.20.00.00
149.	Titanium < 65% Ti dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8108.20.00.00
150.	Spon Zirkonium dalam bentuk bongkahan (lumps) kadar < 85% Zr	ex 8109.20.00.00
151.	Zirkonium dalam bentuk bongkahan (lumps) kadar < 95% Zr	ex 8109.20.00.00
152.	Zirkonium dalam bentuk bubuk kadar < 95% Zr	ex 8109.20.00.00
153.	Zirkonium dalam bentuk granula kadar < 95% Zr	ex 8109.90.00.00
154.	Fero Mangan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Mn < 60%	ex 8111.00.00.00
155.	Mangan spon (Mn < 49% dan MnO ₂ < 4%)	ex 8111.00.00.00
156.	Silika Mangan dalam bentuk bongkahan (lumps) dengan kadar Mn < 60%	ex 8111.00.00.00
157.	Logam krom (Cr) < 99% dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8112.21.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
158.	Logam krom (Cr) < 99% dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8112.21.00.00
159.	Logam paduan (alloy) < 60% Cr dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8112.21.00.00
160.	Logam paduan (alloy) < 60% Cr dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8112.21.00.00
161.	Hafnium dalam bentuk bongkahan (lumps) kadar < 95% Hf	ex 8112.92.00.00
162.	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar < 95% Hf	ex 8112.92.00.00
163.	Logam paduan (alloy) < 65% V dalam bentuk ingot atau batang tuangan	ex 8112.92.00.00
164.	Logam paduan (alloy) < 65% V dalam bentuk bongkahan (lumps)	ex 8112.92.00.00
165.	Hafnium dalam bentuk granula kadar < 95% Hf	ex 8112.99.00.00

2. BATUAN

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
1.	Slate (Batu Sabak) yang belum dilakukan Pemotongan	ex 2514.00.00.00
2.	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan	ex 2515.11.00.00
3.	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.11.00.00
4.	Basalt yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00
5.	Gabro yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00
6.	Granodiorit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00
7.	Peridotit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	ex 2516.90.00.00

NO	URAIAN BARANG	POS TARIF/HS
8.	Perlit yang tidak dilakukan penggerusan dan pemanasan	ex 2530.10.00.00
9.	Toseki yang tidak mengalami pengolahan	ex 2530.90.90.00

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

**SURAT PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN**

NOMOR :

Menunjuk permohonan PT/CV..... No.tanggalbulantahun.....perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, maka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor.....M-DAG/PER/..../..... tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dengan ini memberikan pengakuan sebagai:

**EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN
DAN PEMURNIAN**

(ET-PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN)

Kepada:

Nama Perusahaan :
Jenis Produk Pertambangan
Hasil Pengolahan dan Pemurnian :

Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Nomor Telepon/Fax Perusahaan :
Nomor dan Tanggal Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nomor Ijin Usaha Industri (IUI) :
Nomor dan Tanggal IUP Operasi Produksi/
IUPK Operasi Produksi/ IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
2. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian Perindustrian.

3. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No...../M-DAG/PER/...../..... tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan 3 di atas, dapat dikenakan sanksi pencabutan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.
5. Pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian ini berlaku selama 2 (dua tahun) terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang.
6. Jika dikemudian hari diketemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan dilapangan, maka Pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dapat ditinjau kembali atau dicabut.

Jakarta,

a.n. Menteri Perdagangan R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

(.....)

Tembusan:

1. Mendag (sebagai laporan);
2. Irjen Kemendag;
3. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu;
4. Dirjen Minerba.
5. Dirjen Basis Industri Manufaktur

*) Coret yang tidak perlu

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN

**PERSETUJUAN EKSPOR
PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN**

Nomor : Jakarta,
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth.

-
- Sehubungan dengan surat permohonan PT.... , dan berdasarkan:
- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor....
 - b. Rekomendasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor...
- dengan ini diberitahukan sebagai berikut:
1. Kepada PT...., pemilik:

ET-Produk Pertambangan : No....
Hasil Pengolahan dan Pemurnian
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : No....

dapat disetujui mengekspor... dengan Pos Tarif/HS, nama jenis barang, jumlah barang, negara tujuan dan pelabuhan muat sebagaimana terlampir.
 2. Wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor produk pertambangan sebelum muat barang, dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
 3. Sebelum pelaksanaan verifikasi, pemilik ET-Produk Petambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian wajib menunjukkan lembaran asli persetujuan ekspor atau lembaran copy persetujuan ekspor yang telah dilegalisir oleh Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan kepada Surveyor.
 4. Ekspor tersebut dapat dilakukan sejak tanggal persetujuan ekspor ini ditandatangi sampai dengan yang dibuktikan dengan diserahkannya pemberitahuan kepabeanan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku dan tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain.

5. Setiap pelaksanaan ekspor Saudara wajib menunjukkan lembaran asli persetujuan ekspor atau lembaran copy persetujuan ekspor yang telah dilegalisir oleh Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan kepada petugas Bea dan Cukai setempat guna pengisian kartu kendali realisasi ekspor.
6. Saudara wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor dengan melampirkan fotocopy kartu kendali realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) yang telah ditandasahkan oleh petugas Bea dan Cukai kepada Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan untuk setiap kegiatan ekspor barang-barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa berlaku persetujuan ekspor ini.
7. Pemilik ET-Produk Petambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang telah memperoleh persetujuan ekspor dapat melaksanakan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Saudara bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran, baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor produk pertambangan hasil pengolahan yang dilakukan.

Demikiann agar Saudara maklum.

a.n. Menteri Perdagangan R.I.,
Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Perdagangan;
3. Sekjen Kemendag;
4. Irjen Kemendag;
5. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu;
6. Dirjen Minerba Kemen ESDM;
7. Gubernur/Bupati/Walikota Daerah Pengekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan;
8. Kadis Perindag Provinsi Pengekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan;
9. Kadis ESDM Provinsi Pengekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Muat Setempat; dan
11. Surveyor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

GITA IRAWAN WIRJAWAN



LASMININGSIH

LAMPIRAN VIa

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Kebangsaan	No. Identitas KTP/ Paspor/ Kitas	Keahlian				Pengalaman kerja (thn)
				Verifikator	Drafter	Analis Laboratorium	Geologis	

[Daerah Provinsi],

201

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

GITA IRAWAN WIRJAWAN



LAMPIRAN VIb
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
TENAGA AHLI**

To Whom It May Concern

Diperuntukan bagi pihak/individu yang berkepentingan

N a m a	:	Pas foto warna
Tempat/Tanggal Lahir	:	4 x 6
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	
Alamat e-mail	:	
Telpón	:	
Pendidikan	:	
Referensi	:	
Pengalaman profesi	:	

Pernyataan / Komitmen Profesional :

[Daerah Provinsi], 201

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

GITA IRAWAN WIRJAWAN


LASMININGSIH

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

**DAFTAR PERALATAN LABORATORIUM
PRODUK PERTAMBANGAN**

Nama PT:

Lokasi Kerja:

No	Nama Alat/Instrumen	Merk/Type	Tahun Produksi	Peruntukan Pengujian	Jumlah

[Daerah Provinsi], 201

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

GITA IRAWAN WIRJAWAN


LASMININGSIH

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN

**SPECIMEN DATA PEJABAT PENANDATANGAN
LAPORAN SURVEYOR**

No	NAMA	JABATAN	WILAYAH KERJA	CONTOH TANDA TANGAN	CONTOH CAP

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

GITA IRAWAN WIRJAWAN



LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/M-DAG/PER/1/2014

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

**REKAPITULASI LAPORAN SURVEYOR
PRODUK PERTAMBANGAN**

No	HS	NAMA BARANG	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN MUAT	PROV	NAMA EKSPORTIR	JENIS IZIN PERTAMBANGAN	MASA BERLAKU	JML	VOLUME (TON)	NILAI (USD)	HARGA SATUAN (USD/TON)

[Daerah Provinsi],

201

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

GITA IRAWAN WIRJAWAN


LASMININGSIH